

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Masneldy, K. SE MM
NIDN : 0320056101
Akademi Manajemen Perusahaan Jayabaya

Abstraction

During April 2020, inflation was recorded at 0.09 percent month to month. The corona pandemic has reduced purchasing power in a number of areas. The price development of various commodities showed a very slight increase. In April there was 0.08 percent inflation, April 2020 inflation was lower than March inflation of 0.09 percent. Inflation in April this month experienced a slowdown from the previous month. The slowdown in inflation from the previous month was clearly the impact of the COVID outbreak in Indonesia. This inflation is unusual when compared to the previous pattern. When entering the month of Ramadan, inflation increased, but this year it slowed from 0.9 percent in March and 0.08 percent in April, compared to last year also slowed down. The impact of covid-19 caused Indonesia's economic growth in the second quarter of 2020 to decrease/contract by 5.3 percent (y to y) or 4.19 percent (q to q) compared to the first quarter of 2020. Government policies that must be taken in efforts to overcome macroeconomic problems during the Covid pandemic are divided into 2 safety nets, namely, the Social Safety Net by adding and supporting from APBN financing and the Economic Safety Net by providing fiscal and non-fiscal incentives. Other policies that are also implemented to improve the economy are First, the issuance of Perppu 1 of 2020. Second, the issuance of taxation policies. Third, the issuance of Policies in the Financial Sector.

Keywords : Covid 19 and regional economic growth

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat

pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Pembatasan aktivitas yang diterapkan secara otomatis mengurangi permintaan berbagai sektor seperti transportasi, akomodasi, maupun perdagangan. Turunnya permintaan kemudian direspon oleh penyedia barang/jasa dengan mengurangi produksi atau bahkan menutup usahanya sementara untuk menekan biaya yang dikeluarkan. Pilihan yang umum diambil adalah dengan mengurangi jumlah pekerja, baik dengan dirumahkan sementara atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran di berbagai negara diprediksi meningkat tajam selama pandemi ini. Di Amerika Serikat, tingkat pengangguran melonjak tajam dari 4,4 persen (Maret 2020) menjadi 14,7 persen (April 2020). Hingga bulan Juli, tingkat pengangguran di AS masih bertahan pada 10,2 persen. Tunjangan pengangguran juga meningkat tajam dari USD12,7 miliar menjadi USD197,5 miliar. Sementara di Spanyol, diperkirakan 1,1 pekerja kehilangan pekerjaannya pada triwulan kedua 2020 (Bappenas, 2020). Sejalan dengan peningkatan kasus Covid-19, pertumbuhan ekonomi mayoritas negara di dunia mengalami kontraksi yang semakin dalam. Di sisi lain, perekonomian Tiongkok telah kembali tumbuh meskipun masih lambat. Harga komoditas internasional secara umum turun seiring dengan penurunan permintaan global. Harga minyak mentah dunia bahkan sempat diperdagangkan negatif pada bulan April 2020 akibat penuhnya kapal penyimpanan pasokan. Pembukaan lockdown kemudian mendorong harga komoditas naik secara bertahap. Perekonomian Indonesia pada triwulan II tahun 2020 terkontraksi 5,32 persen (YoY). Dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi pada seluruh komponen. Pengeluaran pemerintah yang diharapkan menjadi penahan kontraksi justru procyclical. Sementara dari sisi lapangan usaha, sektor yang masih tumbuh positif adalah pertanian, infokom, pengadaan air, real estat, jasa kesehatan, pendidikan, dan jasa keuangan. Dari segi kewilayahan, hampir semua wilayah mengalami kontraksi. Kontraksi paling dalam terjadi di wilayah Jawa sebesar 6,7 persen (YoY). Sementara Maluku dan Papua masih tumbuh 2,4 persen (YoY).

Lebih lanjut, Damuri dan Hirawan (2020) menyatakan kasus penyebaran Covid-19 ini selanjutnya dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global value chain). Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini.

McKensey pada salah satu artikelnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat sebesar 2,2 persen atau 1,8 persen, jauh meleset dari prediksi awal. (Craven et al., 2020).

Bahkan IMF juga memberikan prediksi ekonomi global akan menurun tajam dari perkiraan awal menjadi berada pada angka minus 3 persen. (Kemenkeu.go.id, n.d.-c). Sebagai negara yang memiliki jumlah kasus Covid-19 yang cukup signifikan, Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari prediksi awal sebesar 5,04 persen (Lipi.go.id, 2020). Bahkan dalam skenario terburuk, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa berada di angka minus 0,4 persen (VOAIndonesia, n.d.). Dampak ini juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan disemua daerah di Indonesia.

TUJUAN

- a. Memantau dampak krisis akibat pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait kemiskinan dan pembangunan manusia
- b. Mengkaji efektivitas berbagai kebijakan/program pemerintah di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yaitu sebuah metode riset yang berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu (Cresswell: 2017). Data riset fenomenologis diperoleh dari berbagai hasil wawancara yang dilansir dari berbagai media, yang berfokus pada dampak pandemik covid-19 di Indonesia dari ditemukannya kasus covid pertama di Indonesia 2 Maret 2020 hingga 17 Oktober 2020. Medium yang berada di internet memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun interaksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual (lihat. Fuchs: 2014). Tulisan ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta dinamika hubungan fenomena yang diamati pada berbagai berita tentang pandemik covid-19 di Indonesia dampaknya terhadap ekonomi secara nasional setelah pemberlakuan PSBB. Data ditranskrip, lalu dengan merujuk pada rumusan masalah, peneliti melakukan koding, klastering, labelling secara tematik dan melakukan interpretasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun ke lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini. Sumber data: www.bps.go.id, www.bi.go.id, www.bappenas.go.id, www.idx.co.id, www.OJK.go.id, www.JPN.com, www.satgascovid-19.go.id, www.bisnis.com, www.idx.go.id, <https://tirto.id/f4zg>, www.investasi.id,

PEMBAHASAN

Pada tahap Goal Attainment, masyarakat mencoba untuk mengatur dan menyusun sebuah tujuan masa depan dan mengambil keputusan sesuai tujuan tersebut (Sairoh, 2017). Guna mencapai keselamatan ekonomi dan terjaganya kesehatan maka masyarakat yang bekerja sebagai PNS maupun Non PNS serta masyarakat yang berasal dari perdesaan dan perkotaan cenderung memilih melakukan belanja secara online. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19. Sehingga belanja online menjadi pilihan yang diambil oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini. Hal lain juga terlihat ketika sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa pembelian makanan mendominasi pengeluaran mereka. Sebagai kebutuhan pokok, makanan tentu menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Sebagian besar responden mengatakan bahwa pengeluaran mereka didominasi oleh pembelian bahan makanan dari pada untuk membeli kebutuhan lainnya. Hal ini sesuai dengan anjuran para pakar ekonomi yang berpendapat agar dalam masa yang tidak menentu seperti ini maka belanja yang sifatnya investasi ditunda dulu untuk sementara (Thaha, 2020; Sayuti, 2020; Dani, 2020). Sumberdana yang dimiliki hendaknya diarahkan atau dibatasi untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari. Tujuannya adalah agar jangan sampai masyarakat yang telah terdampak secara sosial dengan adanya pandemi ini akan mengalami persoalan ekonomi di kemudian hari akibat dari investasi yang kemudian tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keadaan ini juga untuk mengantisipasi terjadinya food insecurity seperti yang disinyalir dalam temuan Sakri (2020) dalam survei yang dilaksanakan pasca merebaknya Pandemi di awal Maret 2020. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan 35% dari responden yang disurvei menyatakan bahwa volume makanan yang dibeli mengalami penurunan sebagai akibat dari menurunnya pendapatan atau daya beli mereka. Selanjutnya yaitu tahap Integration dimana terjadinya tindakan saling koordinasi antar hubungan unit-unit sistem yang ada seperti sistem budaya, sosial dan organisasi. Salah satunya kemudian mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi terhambat. Integration menjadi sangat penting karena satu sama lain saling mempengaruhi. Disamping menjaga kesehatan dan terhindar dari Covid-19 hal yang tak kalah penting adalah menjaga perekonomian keluarga tetap dalam keadaan yang baik. Mengintegrasikan antara turunnya pendapatan dengan meningkatnya pengeluaran menjadi fenomena tersendiri yang menjadi solusi untuk survive di masa pandemi seperti ini. Jika hal ini tidak dilakukan maka bukan tidak mungkin akan terjadi peningkatan angka kemiskinan. Suryahadi et. al. (2020) memperkirakan secara nasional akan terjadi peningkatan prosentase jumlah penduduk miskin di Indonesia, dari 9,2% pada September 2019, menjadi 9,7% pada September 2020. Tahap terakhir Latency atau pemeliharaan pola yaitu masyarakat harus saling melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Setelah masyarakat mampu beradaptasi dan mencapai tujuan untuk mempertahankan pondasi ekonomi mereka maka langkah selanjutnya adalah mempertahankan pola baru yang sudah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan sistem supaya tetap bertahan dan tidak ambruk. Berdasarkan berbagai literatur yang ada (Azimah, 2020; Kickbusch, 2020; Honoatubun, 2020) diperoleh suatu kesimpulan bahwa pandemi ini menyebabkan terpengaruhnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terjadi suatu perubahan perilaku sosial dan ekonomi pada masyarakat untuk dapat mempertahankan diri dari keadaan yang tidakmenentu dan cenderung berkepanjangan. Ada pola baru yang kemudian terbentuk. Pola baru ini yang kemudian oleh (Sayuti, 2020) disebutkan sebagai masyarakat menghadapi era kenormalan baru (New Normal Era). Fenomena ini dirasakan atau dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, apapun pekerjaan yang mereka kerjakan dan dimanapun mereka bertempat tinggal. Penerapan PSBB selama masa pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat dan

menimbulkan dampak secara ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar responden merasakan dampak pandemi Covid-19 secara ekonomi. Ini dibuktikan oleh jawaban responden yang sebagian besar menyatakan pendapatan yang diterima mengalami penurunan tetapi masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, lapangan pekerjaan menjadi terbatas, pengeluaran menjadi lebih besar dan didominasi oleh pembelian bahan makanan. Pembelian yang dilakukan melalui online menjadi pilihan dari responden. Sehingga bisa dinyatakan bahwa pandemi ini berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik mereka yang berlatar belakang PNS maupun non PNS dan mereka yang tinggal di perdesaan dan perkotaan.

Dampak pandemic Covid 19 terhadap kondisi makro Indonesia bisa dilihat dari beberapa kejadian yaitu : Pertama, Pada bulan April 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, Sektor pelayanan udara kehilangan pendapatan sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan, dimana sekitar Rp. 48 milyar pendapatan yang hilang berasal dari penerbangan China. Ketiga, jumlah wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. Keempat, Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahwa terjadi penurunan tingkat okupansi hotel di Indonesia sebanyak 50%. Sehingga terjadi penurunan jumlah devisa pariwisata lebih dari setengah dibandingkan tahun lalu. Keenam, Hotel, restoran maupun pengusaha retail yang juga merupakan penunjang sektor wisata pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona. Okupansi hotel mengalami penurunan akan mempengaruhi kelangsungan bisnis hotel dalam jangka panjang. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Sektor pariwisata yang melemah juga berdampak pada industri retail. Ketujuh, Penyebaran Covid 19 juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ketika para wisatawan berkunjung ke tempat wisata, para wisatawan tersebut akan melakukan permintaan atau pembelian oleh-oleh. Kedelapan, terjadi inflasi pada bulan Maret 2020 sebesar 2,96% year on year (yoy), dengan naiknya harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Namun di sisi lain terjadi deflasi pada komoditas cabe dan tarif angkutan udara Kesembilan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, terjadi penurunan pada penerimaan sektor pajak sektor perdagangan, padahal sektor pajak memberikan kontribusi kedua terbesar pada penerimaan pajak, ditambah lagi ekspor migas dan non migas juga mengalami penurunan karena China merupakan importir minyak mentah terbesar dan terjadi penurunan output hasil produksi di China padahal China merupakan pusat produksi terbesar di dunia, sehingga Indonesia dan negaranegara lain bergantung sekali pada produksi-produksi China. Kesepuluh, Virus Corona juga berdampak pada investasi, karena adanya ketakutan para investor untuk melakukan kegiatan investasi, di sisi lain para investor menunda investasi karena kurangnya demand.

Berdasarkan data kualitatif menunjukkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis pada kuartal pertama tahun 2020. Terjadi trend pertumbuhan yang menurun. Pada kuartal pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Indonesia tercatat sebesar 2,97 persen (Year over Year (yoy)), pencapaian ini lebih rendah daripada proyeksi Bank Indonesia yaitu sebesar 4,4 persen. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini adalah tidak lepas dari dampak penanganan penyebaran virus Corona yang mulai mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian, baik dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Bank Indonesia memprediksikan bahwa dampak dari

penanganan pandemic Covid ini akan terasa pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020, namun dampaknya sudah mulai terasa Penanganan pandemic Covid ini dampaknya lebih cepat terasa di bulan Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I termasuk salah satu yang tertinggi, lebih baik dari sebagian besar negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I 2020 tercatat -6,8% (yoy), jauh lebih rendah dari pencapaian di triwulan IV 2019 sebesar 6,0%. Pada triwulan pertama tahun 2020, walaupun terjadi kenaikan pertumbuhan yang positif, tapi angka ini lebih rendah daripada nilai pertumbuhan yang dicapai pada triwulan keempat pada tahun 2020 dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,3 persen (yoy). Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Eropa, Singapore dan Korea Selatan pada triwulan I 2020, masing-masing-masing tercatat sebesar -3,3% (yoy), -2,2% (yoy), 1,3% (yoy).

Hampir sekitar 60 persen, pergerakan peningkatan kegiatan ekonomi yang biasanya disumbang oleh konsumsi swasta, juga mengalami kontraksi. Penjualan retail, baik pasar tradisional maupun pasar modern juga mengalami kontraksi. Bahkan penurunan pada sektor riil sudah terjadi sebelum adanya pandemi Covid di Indonesia, yang menunjukkan angka kontraksi sebesar 0,3 persen pada bulan Januari 2020. Perjalanan wisata, baik asing maupun domestik juga mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga menyebabkan anjloknya konsumsi swasta. Menurut data BPS jumlah kunjungan wisatawan manca negara mengalami penurunan sebesar 7,6 persen pada bulan Januari 2020 dibandingkan bulan Desember 2019. Sementara itu pada periode yang sama, wisatawan domestik juga mengalami penurunan sebesar 3,1 persen. Virus Corona berdampak pada semua sektor terutama pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya penyebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI menjadi di Bawah 5 Persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang pada tahun-tahun sebelumnya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) selama April 2020 mencatat inflasi sebesar 0,09 persen month to month. Pandemi corona membuat penurunan daya beli di sejumlah daerah. Perkembangan harga dari berbagai komoditas menunjukkan kenaikan sangat tipis sekali. pada April terjadi inflasi 0,08 persen, inflasi April 2020 lebih rendah dibandingkan inflasi Maret sebesar 0,09 persen. Inflasi April bulan ini mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya. Perlambatan inflasi dari bulan sebelumnya jelas merupakan imbas dari wabah COVID di Indonesia. Inflasi ini tidak biasa jika dibandingkan pola sebelumnya. Ketika masuk bulan ramadan inflasinya meningkat, tapi tahun ini melambat dari Maret 0,9 persen dan April 0,08 persen, dibandingkan tahun lalu juga melambat.

Kebijakan- kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Pertama yaitu, 1. Percepatan Belanja Pemerintah. Mempercepat proses pencairan Belanja Modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, mempercepat pelaksanaan tender, dan lain-lain, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial, transfer ke dana daerah dan desa 2. Perluasan Kartu Sembako untuk meningkatkan manfaat (Rp 150 ribu / bulan → Rp 200 ribu / bulan). Telah dilakukan oleh Kementerian Sosial pada Maret 2020. 3. Perluasan sasaran subsidi bunga perumahan dengan tambahan volume rumah sekitar 175 ribu unit rumah. Saat ini sedang dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan Revisi DIPA masih dalam proses berdasarkan proposal dari Kementerian PUPR. Kontrak dengan Bank Pelaksana direncanakan untuk April 2020.

Kebijakan Kedua, yaitu, 1. Relaksasi Pajak Penghasilan. Pasal 21 Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan Impor Pajak Penghasilan Pasal 22, Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25, pengembalian PPN dipercepat 2. Simplifikasi dan Percepatan Proses Ekspor Impor. Penyederhanaan dan pengurangan pembatasan ekspor dan impor (manufaktur, makanan dan dukungan medis), percepatan proses ekspor-impor untuk pedagang terkemuka, dan layanan ekspor-impor melalui Ekosistem Logistik Nasional. Adapun kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya menstimulasi kegiatan perekonomian di tengah pandemi Covid ini, yaitu terbagi dalam dua jaring pengaman yaitu: 1. Total tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp. 405.1 Triliun (Jaring Pengaman Sosial), yang terdiri dari, Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Kartu Pra Kerja, Program Padat Karya Diskon Tarif Listrik 450 VA dan 900 VA, Insentif Perumahan bagi MBR, Tunjangan Hari Raya, Stabilisasi Harga/Operasi Pasar, Penyesuaian Anggaran K/L 2. Dukungan APBN : Rp70,1 T (Jaring Pengaman Ekonomi), yang terdiri dari: Insentif Fiskal (Peniadaan Pungutan Pajak Penghasilan & Pajak Barang Impor, Pengurangan Pajak Badan dan Percepatan Restitusi PPN, Insentif Non-Fiskal (Penyederhanaan dan Percepatan Proses Exim), Kebijakan Relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kebijakan Bank Indonesia (BI) dan paket Kebijakan OJK dan Pasar Modal Stimulus berikutnya yaitu, pemulihan ekonomi nasional, dengan cara: Pertama, dikeluarkan, Perppu 1 Tahun 2020; Kebijakan Keuangan Negara (APBN), 1. Relaksasi Defisit melampaui 3%, namun mulai Tahun 2023 kembali ke level maksimal 3%, 2. Relaksasi berkaitan dengan alokasi/realokasi belanja antar-organisasi, antar-fungsi, dan antar-program serta mandatory spending, 3. Relaksasi alokasi /realokasi Belanja Pemerintah Daerah, 4. Pemberian Pinjaman kepada LPS, 5. Penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh BI, BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel, 6. Penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum. Kedua, dikeluarkan kebijakan perpajakan: 1. Pemberlakuan penurunan Tarif PPh Badan secara bertahap 2. Insentif Perpajakan di Pasar Modal untuk kepemilikan publik 3. Pemajakan atas Transaksi Elektronik; 4. Perpanjangan waktu administrasi perpajakan, 5. Fasilitas Kepabeanaan dalam rangka Covid-19.. Ketiga, dikeluarkan Kebijakan di Sektor Keuangan, 1. Peningkatan Koordinasi antar lembaga KSSK 2. Memberikan kewenangan yang diperlukan kepada 4 lembaga untuk mencegah terjadinya krisis (forward looking) dalam wadah KSSK a.l. untuk menerbitkan instrumen, BI membeli SUN di pasar perdana, pemberian pinjaman kepada LPS serta OJK dapat meminta merger atau konsolidasi Lembaga Jasa Keuangan, 4. Pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa (LLD) bagi penduduk, 5. Meningkatkan mosi kepercayaan masyarakat tetapi tetap tidak menimbulkan moral hazard

KESIMPULAN

1. Selama April 2020 mencatat inflasi sebesar 0,09 persen month to month. Pandemi corona membuat penurunan daya beli di sejumlah daerah. Perkembangan harga dari berbagai komoditas menunjukkan kenaikan sangat tipis sekali. pada April terjadi inflasi 0,08 persen, inflasi April 2020 lebih rendah dibandingkan inflasi Maret sebesar 0,09 persen. Inflasi April bulan ini mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya. Perlambatan inflasi dari bulan sebelumnya jelas merupakan imbas dari wabah COVID di Indonesia. Inflasi ini tidak biasa

jika dibandingkan pola sebelumnya. Ketika masuk bulan ramadan inflasinya meningkat, tapi tahun ini melambat dari Maret 0,9 persen dan April 0,08 persen, dibandingkan tahun lalu juga melambat.

2. Dampak covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 mengalami penurunan/terkontraksi sebesar 5,3 persen (y to y) atau 4,19 persen (q to q) di banding triwulan I tahun 2020.
- 3 Kebijakan pemerintah yang harus ditempuh dalam upaya mengatasi masalah-masalah ekonomi makro selama pandemi Covid yaitu terbagi dalam 2 jaring pengaman yaitu, Jaring Pengaman Sosial dengan cara penambahan dan dukungan dari pembiayaan APBN dan Jaring Pengaman Ekonomi dengan cara pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kebijakan-kebijakan lain yang juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian adalah Pertama, dikeluarkan, Perppu 1 Tahun 2020. Kedua, dikeluarkan kebijakan perpajakan Ketiga, dikeluarkan Kebijakan di Sektor Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS, Laporan Perekonomian 2020 Jakarta. <http://www.BPS.go.id>

Creswell, John W. 2017. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Damuri dan Hirawan (2020). Mengukur Dampak COVID pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. CSIS Commentaries DMRU- 015. 26 Maret 2020.

Fuchs, Christian. 2014. Social Media: a Critical Introduction. London: Sage.

Honoatubun, S. (2020). "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia". EduPsyCouns Journal. 2 (1):151

Kickbusch, I., Leung, G. M., Bhutta, Z. A., Matsoso, M. P., Ihekweazu, C., & Abbasi, K. (2020). Covid-19: How a Virus is Turning The World Upside Down. Bmj, 1336(April)

Kirigia, J. M., & Muthuri, R. N. D. K. (2020). The Fiscal Value of Human Lives Lost From Coronavirus Disease (COVID-19) in China. BMC Research Notes, 13(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05044-y>

Nasution, Dito. Aditia Darma, Erlina. dan Iskandar Muda, 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020

Nursalim, Isnan. 2020. Imunitas Sosial : Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid-19. Sukabumi : Haura Publishing.

VOA Indonesia. (n.d.). Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 bisa Minus 0,4 persen. VOA Indonesia. (Diakses, 14 Desember 2020) dari

<https://www.voaindonesia.com/a/menkeudampak-Covid-19-pertumbuhan-ekonomiindonesia2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.htm>